

EDUCATION DURING NATIONAL MOVEMENT IN JAVA 1908-1928

Rofiatul Nur Jannah^a, Sumardi^b, Nurul Umamah^c

^aHistory Education Program, The University of Jember, rofitulnurjannah@yahoo.com

^bHistory Education Program, The University of Jember, sumardi57252@gmail.com

^cHistory Education Program, The University of Jember, umamahnurul@ymail.com

Abstract

Education is the way for people to find their own personality. The colonial government provided a variety of school education for indigeneous people to obtain education. The error in this research is how is the education politics background education in Java the national movement of 1908-1928 ?, how is the system of education in Java the national movement of 1908-1928 ?. This research aimed to decrypt education in Java the national movement of 1908-1928. This research method is using historical research method by using approach of sociology of education. The benefits of this research, is expected to increase knowledge and can be used as a source of learning and can be used as a reference for further research. The conclusion that can be drawn from this research is first, Political education of Dutch colonial government in Java year 1908-1928 and education system in Java during national movement year 1908-1928.

Keywords: education, java, national movement

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk mengantar manusia dalam menemukan pribadinya sendiri. Ki Hajar Dewantara dalam Ahmadi, 2001:69 berpendapat bahwa pendidikan dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada setiap diri manusia. Pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, dapat memajukan kehidupan bangsa. Pendidikan pada masa pergerakan nasional dikontrol secara penuh oleh pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda hanya terfokus pada anak-anak berkebangsaan Belanda, sedangkan untuk anak-anak Jawa hanya terbatas pada pendidikan rendah. Penyelenggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai sifat dualisme pendidikan.

Dualime pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk membedakan pendidikan yang diberikan untuk anak-anak Belanda dengan pendidikan untuk anak-anak Jawa. Pemerintah kolonial berusaha untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang bersifat umum bagi penduduk Jawa. Secara umum, pendidikan didasarkan pada golongan penduduk (rasial), selain itu pendidikan juga didasarkan pada keturunan atau lapisan (kelas) sosial yang ada, serta menurut golongan kebangsaan yang berlaku. Prinsip pendidikan tidak mengusahakan supaya rakyat dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Kenyataannya pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial lebih ditekankan pada kemampuan untuk menjadi pekerja kolonial (Umamah, 1997:17). Penyelenggaraan pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dibedakan menjadi dua, yaitu: pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh tokoh pergerakan nasional.

Sekolah yang didirikan oleh pemerintah seperti Sekolah Kelas Satu diperuntukkan bagi anak golongan atas, sedangkan Sekolah Kelas Dua diperuntukkan bagi rakyat biasa. Sekolah Kelas Dua dimaksudkan sebagai Sekolah Rakyat yang memberi pendidikan bersiofat sederhana bagi seluruh rakyat (Nasution, 2014:61). Tahun 1914 terdapat perubahan cukup besar dalam dunia pendidikan di Jawa. intisari dari perubahan dalam dunia pendidikan mendekati lapisan atas pada kebudayaan barat, akan tetapi tujuan pemerintah kolonial Belanda tetap seperti dulu, mendidik anak-anak Jawa menjadi pegawai. Pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda bukan untuk

pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia secara bebas dan merdeka, khususnya masyarakat Jawa.

Pendidikan yang dielenggarakan oleh pemerintah kolonial masih terlihat adanya diskriminasi pada setiap lapisan sosial masyarakat. Diskriminasi tersebut terlihat jelas pada lapisan masyarakat redah. Pendidikan yang diberikan pada golongan rendah sangat berbeda dengan pendidikan yang diberikan pada golongan elite. Pemerintah kolonial pada mulanya mendirikan sekolah-sekolah untuk memajukan masyarakat Jawa, namun pada kenyataannya pemerintah mendirikan sekolah-sekolah tersebut hanya untuk memenuhi kepentingannya saja, bukan untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928; bagaimanakah sistem pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Tujuan penelitian ini adalah: mengkaji secara mendalam tentang politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928; mengkaji secara mendalam tentang sistem pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang ilmu sejarah; bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928; bagi calon pendidik sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menambah penguasaan materi tentang Sejarah Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kompetensi pendidik dalam proses pembelajaran; serta bagi almamater FKIP Univeritas Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagian wujud nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Penelitian.

METODE PENELITIAN (RESEARCH METHODS)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: pengumpulan data (Huristik), kritik sumber (verifikasi), analisis dan sistematis (interpretasi), dan penulisan (Historiografi).

Langkah pertama, pengumpulan data (Heuristik), dalam langkah ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*Library research*). Langkah kedua, kritik sumber. Kritik sumber merupakan salah satu langkah dalam metode penelitian sejarah yang berfungsi untuk menyeleksi atau menyelidiki sumber-sumber atau jejak-jejak sejarah, baik dari wujud fisik maupun isinya untuk kemudian dijadikan sebagai fakta sejarah (Notosusanto, 1971:17).

Langkah ketiga, interpretasi merupakan suatu upaya dalam menetapkan makna dan saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah berhasil dihimpun oleh peneliti. Interpretasi sering dikatakan sebagai sebab dari munculnya subjektivitas peneliti (Kuntowijoyo, 2013:78). Peneliti menyusun fakta-fakta dari sumber sejarah secara kronologis, menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan rasional berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu: politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928, dan sistem pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Langkah terakhir, historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan tahap penulisan untuk merekonstruksi peristiwa yang benar-benar terjadi menjadi kisah berdasarkan fakta sejarah yang berkaitan dengan “Pendidikan di Jawa Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1908-1928”.

PEMBAHASAN

POLITIK PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA YANG MELATARBELAKANGI PENDIDIKAN DI JAWA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL TAHUN 1908-1928

Politik pendidikan pemerintah kolonial Belanda sangat erat dengan hubungan politik yang didominasi oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Politik pemerintah kolonial juga tidak ada dorongan dari nilai-nilai etis untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya (Nasution, 2014:20). Akibatnya pelaksanaan politik etis lebih berpihak pada pemerintah, terlebih dalam bidang pendidikan. Rakyat Indonesia, khususnya Jawa merasa bahwa pendidikan yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia

dianggap sebagai berat sebelah, karena pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda lebih berpihak pada orang-orang golongan atas atau priyayi.

a. Dualisme

Praktik dualisme sudah ada sejak masa VOC. Dualisme dijadikan sebagai ciri khas dalam dunia pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Ciri tersebut terlihat pada perbedaan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Jawa. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dibedakan berdasarkan ras maupun tingkatan sosial.

Ciri dualisme lainnya dalam dunia pendidikan yaitu adanya perbedaan terhadap pendidikan bagi anak-anak Belanda dengan pendidikan bagi anak-anak Jawa. Anak-anak Belanda yang tingkat sosialnya tinggi dapat dengan mudah masuk ELS kelas satu, sedangkan bagi anak-anak Belanda yang tingkat sosialnya rendah hanya bisa masuk ELS bukan kelas satu (Nasution, 2014:24). Pendidikan bagi anak-anak Jawa juga terdapat diferensiasi yang serupa. Anak-anak Jawa yang tinggal di daerah pedesaan hanya dapat masuk Sekolah Desa, sedangkan anak-anak Jawa yang bertempat tinggal di daerah kota atau pusat perdagangan serta daerah industri dapat masuk ke Sekolah Kelas Dua.

Dualisme dipandang sebagai konsekuensi yang nyata bagi berbagai bangsa yang hidup bersama dalam satu hubungan pemerintah kolonial yang sama namun masing-masing bangsa mendapatkan hak yang berbeda-beda. Masyarakat Jawa secara berangsur-angsur mulai menentang adanya sistem dualisme pendidikan. Ketua Kongres Pendidikan pada tahun 1919 mengajukan sebuah pertanyaan kepada pemerintah kolonial, apakah pendidikan yang dilaksanakan atas dasar perbedaan ras dan sosial masih ada makna atau manfaat bagi orang itu sendiri (Nasution, 2014:26). Pendidikan seharusnya didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kemampuan tersebut digunakan untuk menjalin sebuah kerjasama yang bersifat permanen antar berbagai macam bangsa.

b. Gradualisme

Pemerintah kolonial Belanda dirasa sangat lambat dalam memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa. Uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Jawa hanya diberikan sedikit, hal tersebut dikarenakan adanya paksaan untuk memenuhi kebutuhan pengawas perkebunan pemerintah. Tahun 1914 anak-

anak Jawa dapat melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan menengah, karena pada tahun 1914 telah dibuka sekolah menengah untuk anak-anak Jawa. Sekolah yang didirikan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda.

Awal abad ke-20, pendidikan mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pendidikan mulai dibuka akibat pemerintah membutuhkan tenaga kerja atau pegawai pemerintahan serta pegawai pabrik rendahan. Orang-orang Jawa mendesak pemerintah kolonial untuk segera membuka sekolah-sekolah bagi anak-anak Jawa, sehingga pemerintah tidak dapat lagi mengulur waktu. Orang-orang Jawa mendesak pemerintah kolonial Belanda karena orang-orang Jawa berkeinginan anak-anak Jawa dapat melanjutkan pendidikan yang lebih baik dan lebih tinggi untuk mencapai suatu perubahan dalam hidupnya.

Gradualisme menjamin adanya kedudukan yang menguntungkan bagi orang-orang Belanda, khususnya pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda membatasi anak-anak Jawa untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik (Nasution, 2014:23). Gradualisme dilaksanakan karena pemerintah kolonial Belanda berkeinginan supaya anak-anak Belanda yang ada di tanah jajahan lebih maju dibandingkan anak-anak Jawa. Pengurangan jumlah sekolah mengakibatkan lambatnya pendidikan bagi anak-anak Jawa. Jumlah pelajar anak-anak Jawa yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah lebih sedikit jika dibandingkan dengan anak-anak Belanda maupun anak-anak Cina.

c. Konkordansi

Prinsip konkordansi bertujuan untuk menjaga supaya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia khususnya Jawa pada saat itu tetap berada pada kurikulum serta standar pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Tujuan prinsip konkordansi mempunyai maksud untuk mempermudah perpindahan murid-murid yang ada di Indonesia ke sekolah-sekolah Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial hanya dikhususkan bagi anak-anak Belanda yang berada di Indonesia, namun lambat laun tidak sedikit orang-orang Belanda yang bekerja sebagai pegawai telah pensiun dan kembali ke Belanda, sehingga anak-anak Belanda perlu melanjutkan sekolahnya di Belanda (Nasution, 2014:31). Kebutuhan akan pendidikan menjadikan adanya sekolah Belanda di Indonesia yang setara dengan sekolah-sekolah yang ada di Belanda, karena sewaktu-waktu terjadi perpindahan murid dari Indonesia ke Belanda.

Tujuan yang hendak dicapai sekolah Belanda di Indonesia disesuaikan dengan sistem pendidikan seperti sekolah-sekolah yang ada di Belanda. Sekolah-sekolah yang berorientasi Belanda telah mencapai tujuan tersebut, sehingga lulusan dari HBS tidak lagi mendapatkan kesulitan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak Jawa dan anak-anak Cina semakin lama semakin banyak yang masuk ke ELS, hal tersebut menjadi suatu masalah bagi pemerintah. Akibat diterapkannya prinsip konkordansi, kurikulum yang ada pada ELS tidak mampu menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya Jawa.

d. Kontrol Sentral yang Kuat

Pemerintah kolonial Belanda mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Perubahan dalam dunia pendidikan harus memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan. Keputusan yang diambil oleh Gubernur Jenderal dipertanggungjawabkan kepada Raja Belanda. Keputusan Gubernur Jenderal berdampak pada dunia pendidikan yang dilaksanakan di Jawa, akibatnya pendidikan untuk masyarakat Jawa diperketat.

Pemerintah kolonial Belanda berada di bawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan perintah atas nama Raja Belanda. Gubernur Jenderal mempunyai hak untuk mengeluarkan peraturan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Jajahan. Menteri Jajahan harus menjawab semua pertanyaan secara terperinci mengenai pemerintahan jajahan, baik pertanyaan mengenai politik, pendidikan, maupun anggaran biaya yang telah digunakan. Akibat dari itu semua, Gubernur Jenderal cenderung untuk mengawasi administrasi pusat secara ketat (Nasution, 2014:27). Pengawasan administrasi secara ketat dilakukan untuk melindungi diri Gubernur Jenderal sendiri, karena pertanggungjawaban Gubernur Jenderal terhadap Raja Belanda sangat besar.

Masalah pendidikan di tahun 1908 diputuskan secara langsung oleh para pegawai Belanda tanpa adanya pendapat dari orang-orang Jawa. Perubahan pendidikan di Jawa terjadi setelah berdirinya *Volksraad*, sebab dengan berdirinya *Volksraad* masyarakat Jawa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. *Volksraad* mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan selanjutnya. Keputusan akhir dalam menentukan peraturan di dunia pendidikan tetap berada dalam tangan Gubernur Jenderal.

e. Keterbatasan Tujuan

Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah untuk anak-anak Jawa bertujuan untuk mendidik anak-anak Jawa sebagai pegawai rendahan di perkebunan milik pemerintah. Perluasan pendidikan untuk anak-anak Jawa dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan pegawai rendahan dan juga juru tulis. Perluasan pendidikan untuk anak-anak Jawa juga disebabkan karena kebutuhan akan pegawai administrasi rendahan oleh pemerintah, serta perusahaan-perusahaan swasta membutuhkan banyak tenaga kerja rendahan.

Kebutuhan pemerintah dalam memenuhi kekurangan pegawai rendahan dijadikan sebagai ukuran untuk memperluas pendidikan rendah bagi anak-anak Jawa. Kemajuan ekonomi mempengaruhi sifat dari pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak Jawa. Pemerintah yang berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendahan mengakibatkan meluasnya sistem pendidikan yang bersifat vertikal.

f. Tidak adanya Perencanaan Pendidikan yang Sistematis

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial untuk anak-anak Jawa disesuaikan dengan kondisi wilayah atau daerah, namun tetap sekolah rendahan. Sekolah rendahan misalnya Sekolah Desa diperuntukkan bagi rakyat Jawa yang berada di pedesaan. Sekolah Kelas Satu diperuntukkan bagi anak-anak Jawa yang berada di daerah perkotaan. Anak-anak Jawa yang bukan anak kaum elite ataupun ningrat tidak dapat masuk dalam sekolah pegawai.

Sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Belanda sudah terorganisasi secara lengkap daripada sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak Jawa. Anak-anak Jawa yang telah lulus dari ELS tidak dapat dengan mudah melanjutkan pendidikannya. Sekolah-sekolah yang terorganisasi tidak sistematis berdampak pada murid-murid disekolah tersebut, khususnya anak-anak Jawa. Pendidikan yang diperlambat oleh pemerintah kolonial dikarenakan pemerintah kolonial merasa bahwa apabila sekolah-sekolah untuk anak-anak Jawa diperluas dan dipermudah akan berdampak buruk bagi pemerintahan kolonial Belanda.

SISTEM PENDIDIKAN DI JAWA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL TAHUN 1908-1928

1. Pendidikan untuk Bangsa Asing

Pendidikan untuk anak-anak Belanda ialah *Europe Lagere School* (ELS). Guru yang mendidik anak-anak Belanda didatangkan langsung dari negeri Belanda. ELS yang diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dibagi menjadi 3 tingkatan yang sesuai dengan tingkatan orang-orang Belanda sendiri. Tingkatan ELS adalah (1) ELS kelas I; (2) ELS kelas II; dan (3) ELS kelas III.

ELS kelas III juga diperuntukkan bagi anak-anak Jawa yang gaya hidupnya seperti orang-orang Belanda atau anak-anak Indo-Belanda. Fasilitas yang diberikan kepada anak-anak Belanda di ELS sangat baik dan lengkap. Salah satu fasilitas yang ada di ELS untuk anak-anak Belanda adalah adanya perpustakaan dengan buku-buku yang lebih lengkap. Perpustakaan yang sudah ada selalu diperluas untuk mempermudah pembelajaran bagi anak-anak keturunan Belanda.

Pendidikan menengah bagi anak-anak Belanda ialah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Lama belajar di MULO adalah 3 tahun. Anak-anak Belanda yang telah lulus dari ELS dapat melanjutkan pendidikannya di MULO. Guru yang mengajar di MULO merupakan guru yang telah mempunyai ijazah HA (*hoofdacte*) atau kepala sekolah, atau bisa juga disebut sebagai diploma yang mempunyai keahlian dalam mata pelajaran tertentu. Lulusan MULO dapat melanjutkan pendidikannya ke HBS dan AMS.

Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada bangsa Timur Asing (Cina) hampir sama dengan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang Jawa. Orang-orang Cina yang berada di Indonesia dipersulit untuk masuk ELS, sehingga orang-orang Cina mendirikan sebuah perkumpulan yang disebut dengan *Tung Hoa Hwee Kuan* (THKK). Tahun 1908 didirikannya *Hollands Chinese school* (HCS). Tujuan didirikannya HCS supaya bahasa Belanda dapat tergantikan dengan adanya bahasa dan kebudayaan Cina yang telah ditanamkan oleh orang-orang Cina kepada keturunannya. Guru yang mendidik di HCS adalah guru Cina yang berkualitas. Tahun 1917 didirikannya sekolah guru Cina *Hollands Chinese Kweekschool* (HCK).

2. Pendidikan untuk Orang Jawa

a. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial

Sekolah dasar di Jawa berdasarkan keputusan Raja, dibagi menjadi dua kategori, yaitu Sekolah Dasar Kelas Pertama (*de schoolen der eerste klasse*) dan Sekolah Dasar Kelas Dua (*de schoolen der tweede klasse*). Kurikulum Sekolah Desa sangat sederhana. Kurikulum tersebut tidak relevan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa, khususnya rakyat yang tinggal di pedesaan. Bahasa pengantar yang digunakan di Sekolah Desa adalah Bahasa Daerah. Bahasa pengantar yang digunakan di Sekolah Desa menghalangi anak-anak Jawa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik.

Tamatan Sekolah Desa tidak dapat diterima menjadi pegawai, Sekolah Desa hanya semacam kursus pemberantasan buta huruf. Masyarakat Jawa yang telah tamat dari Sekolah Desa kembali menjadi tuna aksara lagi. Sekolah Sambungan (*Vervolkschool*) dibuka untuk meningkatkan kualitas Sekolah Desa.

Vervolkschool merupakan sekolah sambungan dari Sekolah Desa. Masyarakat Jawa yang tamat Sekolah Desa yang mampu dan pandai, diberi kesempatan untuk melanjutkan ke Sekolah Peralihan (*Schakelchool*). Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Belanda. Materi pelajarannya sudah disamakan dengan HIS. Masyarakat Jawa yang tamat dari *schakelschool* diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke MULO.

b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Tokoh Pergerakan Nasional

Awal abad ke-20 hanyalah adat yang sangat berkuasa dalam kehidupan masyarakat Jawa. Adat istiadat tidak memperbolehkan kaum perempuan untuk bersekolah. Kemauan pendidikan perempuan merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan budaya suatu bangsa. Beberapa tokoh pendidikan wanita yang berjasa besar bagi kaum perempuan ialah R.A. Kartini dan Rd. Dewi Sartika.

R. A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong (Jepara). Kartini seorang anak yang suka belajar. Kartini merasakan bahwa kedudukan wanita pada saat itu sangat mengenaskan jika dibandingkan dengan kedudukan wanita Barat. Kartini memperjuangkan perbaikan kedudukan dan derajat wanita. Usaha-usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh Kartini untuk melaksanakan cita-cita memajukan pendidikan wanita ialah dengan membuka Sekolah Gadis di Jepara. Tahun 1912 didirikannya sebuah perkumpulan yang

mempunyai tujuan untuk mencari bantuan keuangan bagi gadis-gadis yang ingin melanjutkan pelajaran.

Rd. Dewi. Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884. Tahun 1922 Sartika dianugerahi bintang perak tanda jasa oleh pemerintah Belanda. Bintang perak tersebut diberikan karena jasa-jasanya dalam bidang pendidikan bagi anak-anak gadis pada saat itu. Sartika mempunyai cita-cita untuk mengangkat derajat wanita Indonesia melalui dunia pendidikan, yaitu memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Sartika mempunyai cita-cita untuk mengangkat derajat wanita Indonesia melalui dunia pendidikan, yaitu memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Tahun 1914, nama Sekolah Istri diubah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Lambat laun sekolah tersebut diubah namanya menjadi Sekolah Dewi Sartika.

Taman Siswa didirikan oleh R. M. Suwardi Suryaningrat lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa lahir sebagai reaksi terhadap sistem pendidikan kolonial yang mempunyai sifat berat sebelah. Taman Siswa didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 (Poesponegoro, 1984:247). Sistem pendidikan Taman Siswa disebut dengan sistem “among”. Sistem ini diterapkan untuk mengganti sistem pendidikan lama yang bersifat perintah, paksaan, dan hukuman.

Sistem among merupakan sistem pendidikan dengan guru yang berperan sebagai pamong, yaitu guru sebagai pemimping yang berdiri di belakang dengan semboyan “tut wuri handayani”. Tut wuri handayani ialah tetap mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak-anak didik untuk berjalan sendiri, tidak terus-menerus “dituntun” dari depan (Mudyahardjo, 2006:307). Cita-cita dalam pendidikan Taman Siswa ialah membangun orang yang berpikir merdeka, yaitu manusia yang merdeka lahir dan batin. Kisah sejarah, sastra, dan cerita-cerita wayang diberikan dengan tujuan untuk memahami gagasan dan cita-cita kemasyarakatan. Taman Siswa tidak hanya mementingkan tingkat kecerdasan, tetapi juga meningkatkan penjagaan dan kesusilaan.

Tan Malaka mempunyai cita-cita untuk mendirikan sekolah sendiri. Tanggal 21 Juni 1921 merencanakan pembukaan sekolah SI (Poesponegoro, 1984:257-258). Sekolah SI didirikan untuk mendidik anak-anak dari anggota SI. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh Tan Malaka dalam sekolah SI untuk menyadarkan secara langsung kepada

murid bahwa cita-cita atau pekerjaan dapat dijadikan sebagai roda penggerak dalam suatu perubahan dalam diri sendiri menjadi lebih baik.

Ksatrian Instituut didirikan oleh E. F. E. Douwes Dekker atau lebih dikenal sebagai Dr. Danudirdjo Setyabuddhi. Tahun 1923, muncul Institut Pengajaran Priangan. Bulan November 1924, sekolah tersebut berganti nama menjadi *Ksatrian School* “Instruksi Sekolah” (Poesponegoro, 1984:264). Usaha yang dilaksanakan Ksatrian Istituut menitikberatkan pada pengajaran berdasarkan jiwa nasional dan pendidikan ke arah manusia yang berpikir merdeka.

Muhammadiyah didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. K. H. Ahmad Dahlan menitik beratkan perjuangannya pada pendidikan dan kemasyarakatan, khususnya di kalangan umat Islam rakyat jelata yang mempunyai karakteristik buta aksara, sangat awam dalam pengetahuan agama, miskin, dan sangat terbelakang akibat politik pemerintah (Djojonegoro, 1996:44). Tujuan pendirian Muhammadiyah untuk meluaskan dan mempertinggi pendidikan agama Islam secara modern dan memperteguh keyakinan tentang agama Islam. Sekolah-sekolah Muhammadiyah ada yang bersifat keagamaan dan ada pula yang bersifat umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Politik pendidikan kolonial Belanda yang melatarbelakangi pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928 adalah dualisme, gradualisme, konkordansi, kontrol sentral yang kuat, keterbatasan tujuan, dan tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis. Politik etis yang dijalankan Van Deventer meliputi tiga bidang yaitu; irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Sejak dilaksanakan politik etis kemajuan pendidikan tampak pesat diwilayah Jawa.

Sistem pendidikan di Jawa pada masa pergerakan nasional tahun 1908-1928. Sistem pendidikan di Jawa dibagi menjadi dua, antara lain; pendidikan untuk bangsa Asing, dan pendidikan untuk masyarakat Jawa sendiri. Pendidikan untuk bangsa asing diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak Timur Asing (Cina). Pendidikan untuk masyarakat Jawa terbagi menjadi dua, yaitu; pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh tokoh pergerakan nasional.

Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial meliputi pendidikan rendah (ELS, HIS, *Schakelschool*, *Volksschool*, *Vervolgschool*, *de schoolen der eerste klasse*, dan *de schoolen der tweede klasse*), pendidikan menengah (MULO, AMS, HBS), pendidikan kejuruan (*Ambachts Leergang*, *Technisch Onderwijs*, *Landbouw Onderwijs*, *Handels Onderwijs*), dan pendidikan tinggi (STOVIA, *Rechtsschool*, *Technische Hogeschool*). Pendidikan yang diselenggarakan oleh tokoh pergerakan nasional meliputi pendidikan wanita (R.A Kartini, Rd. Dewi Sartika), Taman Siswa, Sekolah SI, Ksatrian Institut, dan Muhammadiyah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang disampaikan oleh peneliti adalah:

- 1) bagi calon pendidik sejarah dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang mengkaji secara mendalam tentang pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928;
- 2) bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi yang ingin melakukan penelitian mengenai pendidikan di Jawa pada masa Pergerakan Nasional tahun 1908-1928;
- 3) bagi masyarakat luas khususnya pemerintah, semoga tuisan ini menjadi pembelajaran bahwa pendidikan yang terjadi pada masa Pergerakan Nasional menjadi tonggak dalam memperbaiki pendidikan saat ini, sehingga tidak terjadi lagi dualisme pendidikan seperti pada masa Pergerakan Nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Rofiatul Nur Jannah. mengucapkan terimakasih banyak kepada Dr. Sumardi, M. Hum. Dan Dr. Nurul Umamah, M. Pd. yang telah membimbing dan memberikan masukan serta sabar untuk menyelesaikan jurnal ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman sekalian yang membantu memberikan semangat serta dukungan untuk terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A & N. Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewantara, K.H. (2004). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan. Cetakan ketiga*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dewantara, K.H. (1994). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Kedua: Kebudayaan. Cetakan kedua*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasution, S. 2014. *Sejarah Pendidikan Indonesia, Cetakan kelima*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notosusanto, N. 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI.
- Mudyahardjo, R. 2006. *Pengantar Pendidikan - Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Laporan Penelitian

- Umamah, N. 1997. *Politik Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia Periode 1892-1920*.